**KINERJA APARATUR DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI BOKORI DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Penulis

LAODE MUH. SALMAN OCTOARGI UMUL

NPP. 26.0603

Program Studi : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

salmanoctoargi@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian dan pengamatan dalam kegiatan magang ini bertujuan untuk membahas “Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari”, yang berfokus pada kegiatan serta program pengembangan terhadap objek wisata Pantai Boantai Bokori.

Pengamatan ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Untuk menggambarkan aspek – aspek yang berkaitan dengan fokus yang di amati dan di kaji yang bertujuan untuk memahami sehingga dapat membangun pengetahuan dan mencari apa yang terjadi. Pengolahan data lapangan di padukan dengan teori yang relevan kemudian di lakukan interpretasi.

Hasil analisis yang penulis lakukan bahwa sudah ada upaya yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari dalam pengembangan objek wisata Pantai Bokori. Dalam pelaksanaan program pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas terkait, di temukan kendala – kendala dalam pengembangan obyek wisata ini, diantaranya adalah kurangnya anggaran pengembangan,sarana prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia (aparatur) yang kurang berkualitas, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

.

Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Pengembangan

***ABSTRACT***

*Research and observation in the activities of this internship aims to discuss "Performance of Administrative Department of Tourism and Creative Economy Kendari City", which focuses on the activities and program of development of the attraction Turkish Boantai Bokori, factors supporting and developing type Beaches Bokori, as well as the efforts made Department of Tourism and Creative Economy towards the development of tourism areas.*

*The results of the analysis conducted by the author that there is an effort undertaken by the Department of Tourism and Creative Economy in the development of Kendari attraction Bokori Beach. In the implementation of development programs carried out by the regional government in this case related department, is found constraints - constraints in the development of these attractions, such as the lack of budget development, infrastructure is inadequate, human resources (personnel) are of lesser quality, lack of awareness and community participation.*

*Referring to this, it is expected that the Department of Tourism and Creative Economy Kendari to a maximum of acting against the program - a program that will dilaksanakan.Agar development of facilities and infrastructure management and development of the area attractions Bokori beach can be done quickly and right on target as well as the support of relevant stakeholders to help governments in developing attraction Bokori Beach.*

*Keywords: The performance, Apparatus, Development*

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi wisata yang melimpah baik wisata alam maupun wisata buatan yang disertai dengan keunikan dan keaslian budaya tradisional ditambah dengan peninggalan sejarah atau budaya. Seluruh potensi objek wisata tersebut bisa dikatakan sebagai sumber daya ekonomi sekaligus pelestarian lingkungan yang berperan penting dalam pembangunan kepariwisataan. Indonesia sangat menaruh harapan pada pariwisata mampu mengganti peran migas, harapan ini cukup beralasan karena indonesia memiliki potensi pariwisata yang dapat dioptimalkan.

Dasar hukum pengembangan pariwisata berdasarkan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bisa dilihat pada Pasal 6 bahwasanya pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksana perencanaan pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman dan kekhasan serta tak lupa berdasarkan kebutuhan manusia itu sendiri.

Selain itu, beberapa acuan normatif lainnya yang menunjang pengembangan kegiatan pariwisata daerah, antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pra penelitian di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam melakukan pengembangan wisata di Kawasan Wisata Pantai Bokori adalah terdapatnya benturan kepentingan pariwisata dengan kepentingan masyarakat lokal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang memasuki kawasan pantai untuk tujuan wisata tanpa ijin dari pihak pengelola dan adanya penambangan pasir secara ilegal.

Kawasan wisata Pantai Bokori sering dimanfaatkan oleh warga sekitar yang mencari kehidupan seperti menangkap ikan dengan cara pengeboman. Hal seperti ini akan mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan di kawasan Pantai Bokori yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas objek wisata serta menurunkan minat wisatawan, terutama wisatawan yang bertujuan untuk meneliti atau mengamati biota laut.

Pengembangan wisata Pantai Bokori di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara diperlukan suatu langkah ataupun program khusus yang isinya memberikan arahan dan pedoman pengembangan yang dapat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut. Dengan adanya program khusus yang telah disusun oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “**KINERJA APARATUR DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI BOKORI DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.”**

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam pelaksanaan penelitian penulis menggunakan teori kompetensi menurut Dwiyanto dalam zeithalm yang menjelaskan konsep kinerja bahwa terdapat beberapa komponen yang membentuk dan mempengaruhi kinerja yaitu :

1. Produktivitas
2. Kualitas layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

**3. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam pengembangan Wisata Pantai Bokori Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, faktor-faktor penghambat dan upaya dalam peningkatan kompetensi aparatur.

**4. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan induktif.

4.1 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah teknik wawancara tidak berstruktur. Teknik ini bertujuan agar informasi yang didapatkan bisa lebih akurat karena apabila diberikan pertanyaan secara jelas dan tertulis maka informan terkadang tidak memberi data yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaan penelitian penulis tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dan bukan merupakan pertanyaan tertulis langsung yang diberikan langsung kepada informan saat wawancara.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati sesuatu untuk memperoleh data. Observasi ditujukan untuk memperoleh data dengan melaksanakan pengamatan berulang kali agar mendapatkan data yang lebih akurat. Hal ini juga membuat responden yang diamati terbiasa dan lebih dekat terhadap peneliti sehingga responden dapat memberikan informasi dan berprilaku apa adanya.

1. Dokumentasi

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, *diary*, surat, *e-mail*)” dan sebagai pelengkap data.

4.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilaksanakan pada saat penulis telah melaksanakan pengumpulan data sebelumnya. Kemudian menelaah data yang didapatkan sebagai bahan dalam menyusun kesimpulan serta untuk menyederhanakan agar mudah ditafsirkan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu Teknik triangulasi yang digunakan penulis adalah teknik triangulasi sumber yang dimaksudkan untuk menganalisis data dari berbagai sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara , membandingkan sesuatu yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana suatu organisasi telah tercapai. Dalam hal ini kinerja aparatur dalam pengembangan wisata Pantai Bokori. Untuk mengetahui kinerja suatu organisasi harus digunakan indikator penilaian kinerja. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto dalam Masana Sembiring (2012:98)

**1) Produktivitas**

Pencapaian kerja merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan suatu aparatur yang memiliki produktivitas tinggi, kemampuan aparatur dalam menyelesaikan suatu pekerjaan adalah suatu hal yang wajib untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, pencapaian kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi dalam hal ini pengembangan wisata pantai Bokori masih kurang. Hal ini dapat dilihat belum tercapainya penyelesaian pekerjaannya contohnya dalam mempromosikan wisata Pantai bokori. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mengatakan:

“Pencapaian kerja pegawai di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih kurang, terkadang pekerjaan yang diberikan belum bisa diselesaikan tepat waktu. Hal ini berpengaruh terhadap pengembangan wisata Pantai Bokori. Contohnya pekerjaan dalam mempromosikan wisata Pantai bokori yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 1 minggu tidak tercapai malah pegawai baru bisa menyelesaikan lebih dari 1 minggu”.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wisata pantai bokori, beliau mengatakan bahwa:

Tidak sedikit pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditugaskan di pulau kadang tidak berada di pulau untuk melakukan pelayanan kepada wisatawan, mereka kadang hanya sampai di area dermaga penyebrangan dan nongkrong di warung mereka menunggu sampai pulau sudah agak rame baru mereka berangkat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa efektivitas dan pencapaian kerja pegawai di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih kurang dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan.

**2) Kualitas Layanan**

Pelayanan kepada wisatawan di pantai tersebut yang masih belum diperhatikan dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini disampaikan oleh wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bokori dari hasil wawancara. Beliau mengatakan:

“Untuk mendapatkan pelayanan saat di lokasi wisata masih sangat sulit. Sulitnya menemukan pengelola yang bertanggung jawab dalam hal penyewaan gazebo dan juga layanan transportasi yang belum maksimal disediakan oleh petugas pantai serta akses jalan untuk menuju ke lokasi wisata Pantai Bokori yang masih belum baik”

Hal yang sama di sampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau mengatakan:

“Kerena jarangnya pegawai yang mau bertugas di pantai mengakibatkan pemberian pelayanan terkait kebutuhan pelanggan di pantai masih sangat kurang, banyak wisatawan yang mengeluh saat saya berada disana terkait hal tersebut saya akan kordinasikan dengan bagian perencanaan dan pelaporan untuk mencari solusi yang tepat untuk permasalahan ini.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan serta hasil dari wawancara penulis menyimpulkan bahwa kemudahan wisatawan dan kenyamanan wisatawan masih sangat kurang, masih sangat di perlukannya respon baik dari pegawai terkait kenyamanan serta kemudahan bagi wisatawan. Untuk mewujudkan hal ini tentu di butuhkannya kecukupan dana dari dinas terkait untuk melengkapi perlengapan terkait perlengkapan keamanan yang dimana kelengkapan kemanan merupakan salah satu SOP dari suatu pelaksanaan objek wisata.

**3) Responsivitas**

Merespon kebutuhan masyarakat wisatawan dan merespon keluhan terhadap wisatawan merupakan dua hal yang menjadi alat untuk mengukur tingkat responsivitas dari aparatur dinas pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hasil wawancara terhadap salah satu pengunjung wisata Pantai Bokori mengatakan:

“Perlunya penambahan penampungan untuk air bersih, waktu itu saya sudah melapor ke bagian pelaporan bahkan lebih dari dua kali tetapi tidak mendapat tanggapan. Hal ini harus mendapat perhatian karena hal tersebut menjadi permasalahan bagi pengunjung lainnya yang ingin membilas badan setelah bermain dengan air laut dan juga pelayanan terhadap wisatawan yang ingin mendapatkan kelengkapan untuk menyelam masih sangat susah untuk mendapatkan aksesnya.”

Hal yang serupa dikatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi wisata pantai bokori, beliau mengatakan:

“Banyak pegawai yang bertugas di pantai sejauh ini terkesan malas dalam mendengarkan kebutuhan wisatawan memang hanya beberapa ada juga yang peduli melaporkan kepada atasan tetapi lebih banyak yang cuek. Saya tidak tau hal ini disebapkan oleh apa, mungkin disebapkan kualitas aparatur kita yang masih kurang.”

Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan pelaporan, beliau mengatakan: “Saya sudah banyak menerima laporan dari warga maupun dari pihak pegawai lainnya tentang hal tersebut, dalam hal ini saya sudah berkordinasi dengan bagian kepegawaian membahas sangsi bagi aparatur yang tidak tertip”

Respon aparatur dinas pariwisata sampai dengan saat ini hanya masih sebatas mendengarkan saja tanpa ada tindak lanjut secara mendalam. Hal ini juga di sampaikan dalam wawancara dengan Kepala Bidang perencanaan dan pelaporan, beliau mengatakan: “Tanggapan beberapa ASN terkait kebutuhan wisatwan sangat rendah melihat kondisi dari keuangan dan kesiapan perlengkapan hal ini yang menyebapkan terjadinya sikap kurang respek dari aparatur di objek wisata.”. Sangat perlunya respon tanggap untuk mendukung pengembangan daerah pulau. Hal ini juga disampaikan oleh kepala bidang pengembangan destinasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif “Banyak pegawai yang kadang terkesan masa bodo dengan masukan dari wisatawan,kadang wisatawan itu langsung hubungi saya kebetulan wisatawan itu adalah kerabat saya”. Selain itu kawasan masih memerlukan tempat penginapan bagi wisatawan yang berasal dari luar daerah dan mancanegara. Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, beliau mengatakan:

“Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari masih terus berusaha dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan. Pengembangan yang dilakukan masih dalam tahap pembangunan”. Diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat cepat terselesaikan dan dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan wisata Pantai Bokori”

Selain itu banyaknya keluhan dari wisatawan yang berkunjung terkait kenyamanan wisatawan saat melakukan penyelaman yang terganggu oleh racun dari pengeboman ikan yang dilakukan oleh beberapa nelayan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini disampaikan oleh wisatawan yang berkunjung, beliau mengatakan:

“Kami kadang merasa terganggu dengan kondisi air laut yang agak tercemar akibat pengeboman ikan dan proses pngeboman yang membahayakan pengunjung saat akan ingin berenang di sekitaran pulau dan terumbu karang. Hal ini juga yang buat kami para pengunjung enggan untuk berenang di bagian air karena banyaknya kapal nelayan yang lewat dengan cepat tanpa memperhatikan keselamatan pengujung sekitar”

Pernyataan pengunjung di atas di benarkan oleh kepala keamanan pantai, beliau mengatakan:

“Sudah sangat sering kami lihat memang banyak kapal yang melakukan pengeboman ikan secara ilegal dan membahayakan pengunjung dengan laju kapal yg kencang. Kami sudah melakukan mediasi dengan para nelayan tetapi masih ada saja nelayan yang tidak memperhatikan hal tersebut dan masih melakukan hal yang di larang.”

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diakukan penulis, respon aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif provinsi sulawesi tenggara terhadap permintaan wisatawan masih kurang, karena belum mampu memenuhi setiap kebutuhan dan keluhan dari wisatawan.

**4) Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis menemukan bahwa responsibilitas yang masih kurang. Kesesuaian kegiatan dengan prinsip administrasi tersebut yang masih belum diperhatikan dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini disampaikan oleh wisatawan yang berkunjung ke Pantai Bokori dari hasil wawancara. Beliau mengatakan:

“Seharusnya pemberian karcis dilakukan saat awal masuk ke objek wisata bukan saat akan pulang dari objek wisata,kejadian ini membuat tidak adanya legalitas karcis yang membuat objek wisata terkesan kurang di perhatikan pemerintah dan pandangan masyarakat yang merujuk pada kegiatan pungli.”

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penulis menemukan bahwa adanya pertanggung jawaban terhadap tugas yang baik dari aparatur dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, hal ini diisampaikan oleh kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata. Beliau mengatakan;

“sejauh ini saya melihat para pegawai bidang destinasi sudah bekerja dengan baik dengan memperhatikan tugas yang di berikan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya seperti pengambilan rekap data pengunjung tahunan yang dilakukan tiap per dua minggu serta menjalankan jadwal piket pulau tiap harinya dengan tertib”

Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau mengatakan bahwa:

“menurut pemantauan saya sejauh ini para ASN yang berada atau ditugaskan di wilayah pantai sudah cukup baik dalam manjalankan tanggungjawab kepada tugas,sehauh ini juga saya belum mendengar laporan dari masyarakat ataupun dari bagian kepegawaian terkait hal tersebut.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan,kesesuaian antara kegiatan dengan prinsip-prinsip administrai Pantai Bokori masih kurang tetapi pertanggung jawaban aparatur terhadap tugas yang di berikan sejauh ini masih baik melihat dari terlaksana dengan baiknya beberapa tugas yang diberikan.

**5) Akuntabilitas**

Tingkat konsistensi kebijakan dalam kegiatan organisasi merupakan suatu hal yang mendukung keberhasilan terlaksananya tujuan organisasi tersebut. Konsisten dalam pelaksanaan kebijakan membantu mengarahkan hasil kebijakan menjadi hasil yang baik melihat dari dukungan masyarakat dalam hal ini penduduk dan wisatawan.

Contohnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif terkait tranportasi yang melibatkan masyarakat setempat tetapi kebijakan ini kemudian berubah tergantung keadaan. Hal ini juga di katakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mengatakan:

“Kami memang pernah mengeluarkan kebijakan terkait tranportasi oleh masyarakat setempat tetapi kami tarik kembali sebap kami temukan pelanggaran saat proses pelaksanaannya yang dimana pelanggarannya tersebut merupakan hal yang paling sering terjadi terutama di bagian sektor transportasi”

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau menyampaikan bahwa:

Kebijakan yang kami keluarkan untuk mendukung pengembangan wisata kadang terkendala oleh sikap masyarakat setempat yang kuramg mau bekerjasama hal ini menyebapkan kami dari pihak pemerintah bingung tetapi kami akan terus melakukan mediasi terkait kebijakan yang akan kami keluarkan guna mendapatkan putusan terbaik antar kedua belah pihak.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat terkait hal tersebut, mengatakan;

“Pemerintah seharusnya mampu menetapkan kebijakan yang jelas supaya tidak banyak warga setempat yang bingung terutama dalam hal transportasi menuju ke pulau bokori yang dimana hal ini merupakan hal pendukung pengebangan objek wisata”

Wawancara juga dilakukan kepada Kepala bagian perencanaan dan pemasaran, beliau mengatakan:

“Segala kebijakan terkait pengembangan wisata pantai selalu tersandung masalah dengan warga padahal kami sudah melakukan sosialisasi terkait kebijakan sejak jauh jauh hari dengan melibatkan unsur pemerintahan dan perwakilan dari masyarakat setempat tapi hasilnya sama saja kurang kesadaran.”

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diakukan penulis, tingkat konsistensi kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif provinsi sulawesi tenggara masih kurang, karena belum mampu konsisten terhadap pelaksanaanya yang berpengaruh pada pengembangan pantai yang terhambat masalah tranportasi.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari sebagai lembaga yang paling berperan dalam pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan memiliki kinerja pada aparatur pemerintahan yang masih rendah, hal ini di karenakan minimnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang pariwisata.
2. Potensi obyek dan daya tarik wisata Pantai Bokori di Kota Kendari belum berkembang secara optimal karena kondisi objek dan daya tarik wisata belum tertata dengan baik dan hanya dibiarkan apaa adanya menurut kehendak dan kejadian alam dikarenakan kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya dana yang dimiliki menyebapkan terbatasnya pemasukan dan kurangnya minat investor asing serta kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dan banyak yang tidak sesuai dengan bidang pariwisata.
3. Pengelolaan sektor pariwisata Pantai Bokori di Kota Kendari memerlukan upaya dari Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif seperti: meningkatkan partisipasi dari seluruh pihak baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar kepariwisataan memperoleh penanganan yang baik dan profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pendapatan asli daerah.

**7. DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ella, Wargadinata. 2014. *Metodologi Penelitian Praktis*. Jatinangor:

IPDN Pers.

Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Joko, Widodo. 2011. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mardalis. 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bhumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Masana, Sembiring. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung: Fokusmedia.

Nazir, Mohammad. 2013. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sedarmayani. 2014. Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata. Bandung: PT Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tumar, Sumihardjo. 2012. *Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur.* Jatinangor: IPDN Pers.

Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Kencana.

**PERATUTAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.